

**IMPROVING PLANNING CAPACITY AT THE PLANNING AND RESEARCH
AND DEVELOPMENT AGENCY (BAPELITBANG) IN AN EFFORT TO REDUCE
EXTREME POVERTY IN SIKKA DISTRICT**

**PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BADAN
PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPELITBANG) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
EKSTREM DI KABUPATEN SIKKA**

Robertus Yan Rino^{1*}, Yosefina Andia Dekrita², Yustina Da Silva³

Universitas Nusa Nipa, Maumere, Indonesia^{1,2,3}

robertusrino60@gmail.com^{1*}, andiadekrita1234@gmail.com²,

yustinaoliviadasilva@gmail.com³

ABSTRACT

Extreme poverty is an urgent national problem that requires systematic, integrated and comprehensive measures and approaches. The purpose of this internship report is to find out and explore the Planning Capacity of the Planning and Research and Development Agency in Efforts to Overcome Extreme Poverty in Sikka Regency. This work internship activity was carried out at the Sikka Regency Planning and Research and Development Agency Office on Mawar Street, Madawat Village, East Alok Subdistrict, Sikka Regency. Extreme poverty is a complex and multidimensional problem. The causes are not only limited to income, but also access to economic resources, fulfillment of needs for balanced nutrition and healthy living, access to information about education, access to infrastructure and transportation, gender discrimination, the elderly and people with disabilities.

Keywords: *Bapelitbang Sikka Regency, poverty reduction, extreme poverty*

ABSTRAK

Kemiskinan ekstrem merupakan sebuah permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Tujuan dari laporan magang ini adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi Kapasitas Perencanaan Pada Badan Perencanaan Dan Penelitian dan Pengembangan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sikka. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Jalan Mawar Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Kemiskinan ekstrem merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Penyebabnya tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses terhadap sumber ekonomi, pemenuhan kebutuhan sumber gizi seimbang dan hidup sehat, akses informasi tentang pendidikan, akses infrastruktur dan transportasi, diskriminasi gender, lansia dan penyandang disabilitas.

Kata kunci: *Bapelitbang Kabupaten Sikka, penanggulangan, kemiskinan Ekstrem*

PENDAHULUAN

Perkembangan informasi dan teknologi telah mendorong pergeseran segala aspek kehidupan manusia ke arah revolusi industri 4.0 di mana *internet of thing* dan *artificial intelligence* menjadi tulang punggung teknologi untuk menghubungkan manusia dengan mesin. Pergeseran ini mengubah tatanan kehidupan masyarakat termasuk proses pendidikan dan menyebabkan banyak hal mengalami disrupsi. Proses belajar mengajar yang sebelumnya berfokus pada *teacher learning*, semakin

bergeser karena sumber ilmu dan pengetahuan tidak hanya bergantung dari dosen namun dapat diperoleh dari mana saja, dari dunia industry, lingkungan sekitar, pengalaman maupun dunia maya/internet. Pola perilaku dan kebiasaan mahasiswa saat ini juga berubah karena adanya perbedaan generasi ke mahasiswa generasi Z.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat,

kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and a match* tidak saja dengan dunia industry dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang sangat berubah dengan cepat. Perguruan tinggi di tuntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.

Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Proses pembelajaran dalam kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta pengembangan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan.

Melalui program kampus Merdeka yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program kampus Merdeka bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar memiliki pengalaman, dengan cara memberikan pembelajaran

secara langsung di tempat kerja (*Experiential learning*). Mahasiswa akan mendapatkan *Hardskills* dalam bentuk keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*. Salah Satu dari kebijakan kampus Merdeka adalah Magang Kampus Merdeka.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka terutama magang sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, mengenal dan mengetahui dunia profesi atau system kerja dunia profesional yang sebenarnya. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa akan mengalami keterlibatan langsung dan mendalam sebagai pengalaman yang berguna di kehidupan setelah menempuh perkuliahan, gambaran nyata dunia kerja, membangun relasi dan koneksi didalam industry tempat magang, serta perkembangan maupun keberlanjutan untuk karier kedepannya didunia pekerjaan.

Program magang merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mendapatkan pengalaman dalam berkontribusi dan berkarya di kehidupan nyata, dengan demikian diharapkan setiap mahasiswa mampu mengikuti dan memahami kegiatan kerja yang dilakukan di dunia kerja, sehingga mendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya sendiri serta mampu menunjukkan kinerjanya yang maksimal. Program magang dapat membentuk mental dan motivasi mahasiswa serta berjiwa kerja keras, jujur, bertanggung jawab, serta ulet dalam bekerja (Suharyanti, Murtini & Susilowati, 2016) . Universitas Nusa Nipa juga menanggapi program yang di selenggarakan oleh kemendikbudristek tersebut. Untuk mengimplementasikan kebijakan dari Kemendikbudristek yaitu Kampus Merdeka terkhusus di program magang, Universitas Nusa Nipa menjalin Kerjasama (MoU) dengan

instansi pemerinath salah satunya adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Sikka untuk menjadi tempat magang bagi mahasiswanya.

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu perangkat daerah pada lingkup pemerintahan Kabupaten Sikka yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan. Bapelitbang Kabupaten Sikka menjalankan fungsinya untuk melakukan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, menyusun perencanaan kebijakan anggaran daerah, mengkoordinasi, mengendalikan, memantau dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Sikka khususnya di bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (PPM) memiliki kewajiban untuk melakukan motivasi dan koordinasi terhadap program lintas sektor karena dalam pelaksanaannya memerlukan kontribusi dari sejumlah perangkat daerah yang ada seperti halnya juga dilaksanakan dalam rangka perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis selama magang di bidang Pemerintahan dan Pembanguna Manusia (PPM) salah satu masalah serius yang di hadapi oleh bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah harus adanya

perencanaan yang baik untuk penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan Ektrem merupakan kondisi ketidakmampuan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Kemiskinan ekstrem merupakan sebuah permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Penanganan masalah kemiskinan ekstrem merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang akan berdayaguna secara efektif jika penanganannya dilakukan secara lintas sektor dan menjadi tanggungjawab multipihak serta terkoordinasi dengan baik, sehingga ada sinergi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana salah satu tujuan utama yang ingin dicapai adalah tanpa kemiskinan, maka pemerintah berkomitmen melakukan upaya-upaya perencanaan percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran. Selain itu diperlukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan di tingkat

nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/ kota.

Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem harus dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu dan merata disetiap wilayah. Beberapa capaian pembangunan yang berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan ekstrem antara lain alokasi anggaran Kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial (Sari, 2016). Strategi pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat di bagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan system jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha.

Konsep kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut Jhon Friedman (1987) terdiri atas empat tipe yaitu perencanaan sebagai reformasi sosial (*Social reform*), perencanaan sebagai analisis kebijakan (*Policy analysis*), perencanaan sebagai pembelajaran sosial (*Social learning*), perencanaan sebagai mobilisasi sosial (*Social Mobilization*). Sedangkan jenis-jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan model pembangunan yang mendasari program-program tersebut untuk melihat titik berat strategi yang

dijalankan program tersebut. Model pembangunan yang dianut negara berkembang secara garis besar terbagi dalam 3 model Pembangunan yaitu : Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, Pembangunan kebutuhan dasar/ kesejahteraan, Pembangunan yang berpusat pada manusia.

Bapelitbang telah berupaya melakukan berbagai program perencanaan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka sesuai dengan Surat Mendagri No.400.4.2/9839/Bangda Pada Tanggal 12 September 2023 tentang program kegiatan, sub kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan implikasi dari Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022, dimana penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka di lakukan dengan cara pengurangan beban pengeluaran Masyarakat miskin : Strategi pengurangan beban pengeluaran Masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu :a. Bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako, b. Bantuan sosial khusus seperti bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos regular, c. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, d. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak dan penyandang disabilitas. 2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Strategi peningkatan pendapatan Masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Masyarakat, diantaranya melalui : a. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/ kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana, b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan

pelatihan, c.Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal dan akses penggunaan lahan, d.Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan e. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro. 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui :a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur Pendidikan, layanan dan infrastruktur Kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, b. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti Pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta Pembangunan infrastruktur jalan.

Strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem yang menysasar secara langsung ataupun tidak langsung dari unsur penjunjang di Kabupaten Sikka melalui program-program antara lain : 1. Program pengelolaan Pendidikan, 2.Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, 3.Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), 4.Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum, 5.Program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, 6.Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), 7.Program penanggulangan bencana, 8.Program pemberdayaan sosial, 9.Program rehabilitasi sosial, 10.Program perlindungan dan jaminan sosial, 11.Program penanganan bencana, 12.Program perlindungan Perempuan,13.Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat,14.Program penanganan

kerawanan pangan ,15.Program pendaftaran penduduk, 16.Program pencatatan sipil, 17.Program pengelolaan informasi administrasi kependuduk, 17.Program pengelolaan profil kependudukan, 18.Program administrasi pemerintahan desa, 19.Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Namun pelaksanaan program tersebut belum mencapai hasil yang optimal, sehingga masih terdapat beberapa Desa/Kelurahan di Kabupaten Sikka yang mencapai tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Data 10 Desa Dengan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Sikka

No	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jumlah KK Miskin Ekstrem	Persentase
1.	Wolomarang	Alok Barat	2.486	2.35 %
2.	Nirangkliung	Nita	2.392	2.26 %
3.	Nangahale	Talibura	2.050	1.94 %
4.	Hale	Mapitara	1.502	1.42 %
5.	Ipir	Bola	1.479	1.40 %
6.	Nembura	Doreng	1.471	1.39 %
7.	Baang Koor	Talibura	1.395	1.32 %
8.	Wolonwalu	Bola	1.391	1.31 %
9.	Wuring	Alok Barat	1.329	1.26 %
10.	Pemana	Alok	1.323	1.25 %

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka,2022

Kemiskinan ekstrem di kabupaten sikka masih cukup tinggi. Desa/ Kelurahan yang menempati posisi tertinggi adalah kelurahan wolomarang dengan jumlah 2.486 (2,35%), dan diikuti oleh 9 desa lainnya sesuai dengan tabel 1.1. Jika sesuai dengan arahan presiden pada rapat terbatas tanggal 4 maret 2020 menginstruksikan kemiskinan ekstrem turun 0% pada tahun 2024,tetapi sampai dengan saat ini angka kemiskinan ekstrem masih ada. Seseorang di katakan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ditentukan menggunakan “*Absolute Poverty Measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin ekstrem jika pengeluaran di bawah 10.739/orang/hari atau Rp.322.170/orang/bulan (BPS,2021).

METODE PENELITIAN

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Jalan Mawar Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Kegiatan magang kerja dijalankan selama kurang lebih 5 bulan terhitung mulai dari tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 23 Desember 2023.

Ada beberapa prosedur pelaksanaan kegiatan magang kampus merdeka yaitu :

1. Tata Cara Pelaksanaan Magang
 - a. Mahasiswa mengambil formulir magang di TU, kemudian ditandatangani oleh Ketua Program Studi Manajemen.
 - b. Mahasiswa yang melaksanakan magang berpakaian atas putih bawah hitam, bersepatu kulit, sopan, rapih dan memakai jas almamater
 - c. Mahasiswa harus membuat laporan secara individu setelah masa magang selesai
2. Jangka waktu pelaksanaan magang selama 3 bulan dengan toleransi kurang lebih 15 % magang dijalankan secara paruh waktu (part time), namun harus selesai dalam waktu 5 bulan.
 - a. Pelaksanaan magang harus dicatat dalam sebuah log harian dan dalam 1 minggu sekali harus di tandatangi oleh pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh instansi dalam membimbing proses pelaksanaan magang.
 - b. Menjelang akhir pelaksanaan magang, mahasiswa harus

mengalokasikan waktu untuk mengadakan observasi lapangan/wawancara hasil analisa dan dampak pelaksanaan magang ini harus terdokumentasi dengan baik dalam log harian.

- c. Pada akhir masa peaksanaan magang, mahasiswa dianjurkan untuk meminta surat keterangan pengalaman kerja yang resmi dari instansi.
- d. Pada ahir masa magang, pihak instansi harus memberikan laporan penilaian magang.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penulis mulai melaksanakan kegiatan magang pada hari Rabu, 16 Agustus 2023. Kegiatan Magang dilaksanakan kurang 5 bulan dengan mengikuti jadwal kerja yang berlaku yaitu setiap hari senin sampai dengan jumad. Waktu pelaksanaan kegiatan magang setiap harinya dimulai dari jam 07:30 sampai dengan 16:00 WITA. Selama Magang di Kantor Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) penulis ditempatkan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).

Kegiatan/ aktivitas yang dilakukan oleh penulis selama magang di Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan adalah: (1) Menyusun arsip surat masuk, surat keluar, arsip keuangan, arsip notulensi mulai dari 2018-2023; (2) Membantu print surat masuk dari email yang di berikan oleh bidang; (3) Mengikuti rapat *zoom meeting* bersama Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan agenda sosialisasi RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dari Kementerian Sosial; (4) Mengikuti rapat koordinasi persiapan *Launching* PAUD HI; (5) Mengikuti rapat koordinasi bersama para kapid; (6)

Mengetik Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; (7) Membantu print sertifikat PAUD HI; (8) Menghadiri acara *Launching* PAUD HI di KB Fos Carmeli di Kewapante; (9) Rapat koordinasi bersama Kabid persiapan verval data kemiskinan ekstrem di Pulo; (10) Mengikuti kegiatan pengambilan data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) di Pulo dan Desa Kojagete dan Parumaan; (11) Membantu mengisi SPPD dari pulo dan Kojadoi dan membantu menulis kwitansi pembayaran untuk penginapan perjalanan dinas ke pulo; (12) Membantu *Scan* dokumen-dokumen kantor; (13) Membantu print surat masuk dari dinas Pendidikan; (14) Membuat kerangka acuan perjalanan dinas ke Kojagete dan Parumaan; (15) Mengambil nomor surat di sekertariat; (16) Mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan PAUD HI di Kabupaten Sikka bertempat di Hotel Lokarya Indah; (17) Membantu menyetik surat SK.Kaban KLA 2023 dan menyetik daftar pembayaran Honor Paud HI; (18) Membantu menyetik surat dan membuat diagram dan grafik di bidang untuk data Angka gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Sikka selama 5 tahun terakhir; (19) Membantu menyetik surat pembayaran PAUD HI; (20) Menjadi notulen dalam rapat pengenalan aplikasi srikandi dan rapat pembahasan RAD Paud HI; (21) Mengikuti pembukaan Festival Jelajah Maumere di Lapangan Kota Baru; (22) Melakukan perjalanan dinas ke Pamana dan Ngolo untuk verval data P3KE; (23) Mengikuti rapat koordinasi terkait stunting; (24) Membantu menyetik surat undangan dan mencetak amplop untuk surat undangan kegiatan; (25) Mengikuti pertemuan bersama adinkes NTT terkait penanggulangan penyakit ATM dan Menular lainnya; (26)

Mengikuti pertemuan bersama BKKBN provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema pendampingan penyusunan perencanaan program bangga kencana dan fasilitas penetapan data parameter kependudukan dalam dokumen RPJMD; (27) Membantu menyetik lampiran asersi dan matriks dan print file-file matriks dan lampiran asersi untuk diserahkan ke dinas-dinas terkait; (28) Mengikuti rapat bersama fren persiapan pelaksanaan penasehat anak; (29) Mengikuti rapat *zoom meeting* penelitian bersama Universitas Nusa Nipa tentang Indeks Kualitas Publik, Indeks Pembangunan Literasi, Indeks Kualitas Infrastruktur; (30) Mengikuti pertemuan di hotel pelita tentang stunting, AKI , AKB; (31) Mengikuti kegiatan Workshop dan *Focus Group Discussion* (FGD) ,laporan pendahuluan penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2045 kerjasama pemerintah Kabupaten Sikka dengan Universitas Gajah Madah Jogjakarta; (32) Melakukan kegiatan koordinasi verval data P3KE di beberapa Desa; (33) Membantu menyetik surat berita acara serah terima data P3KE Kabupaten Sikka dan Membuat Notulensi hasil rapat tentang stunting dan input data di aplikasi bina bangga; (34) Melakukan uji petik data P3KE di Desa Baomekot, Nelle Urung dan Hewuli; (35) Melakukan koordinasi persiapan sosialisasi verifikasi validasi data P3KE di Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Nelle dan Kecamatan Alok Barat; (36) Membuat Inventarisir Berita Acara permohonan data P3KE yang masuk dari kecamatan; (37) Mengikuti sosialisasi pedoman verifikasi data P3KE di Kecamatan Nelle, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Tanawawo dan Kecamatan Alok Barat; (38) Membuat surat undangan rapat koordinasi pokjanal posyandu; (39) Membantu membuat daftar isi RAD

Paud HI; (40) Mengetik hasil Notulen dan menyerahkan hasil notulen rapat ke staf bidang PPM

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan esktrm di Kabupaten Sikka sangatlah bergantung pada sinergitas lintas sektor pemangku kepentingan. Peran serta dunia usaha, Lembaga masyarakat dan media massa menjadi sangat penting, guna bahu membahu bersama pemerintah dalam menanggulagi kemiskinan esktrm.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Maria Mei Ika Yuplina, S.STP, M.Ec.Dev, selaku Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), menyatakan bahwa untuk program penghapusan kemiskinan esktrm di Kabupaten Sikka telah dilaksanakan beberapa intervensi program seperti :

- a. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat dengan memberikan bantuan
 1. Bantuan sosial regular, seperti program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako, dimana program-program tersebut merupakan program dari pusat yang dilaksanakan oleh daerah.
 2. Bantuan Sosial khusus seperti bantuan Langsung Tunai Desa Rp.300.000/3 Bulan, Bantuan Sosial Presiden dan *Top Up* bansos regular yang pernah ada dari pusat dan dilaksanakan oleh daerah.
 3. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
 4. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak dan penyandang disabilitas, anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Sikka
- b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat melalui Nakertrans, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan dan UMKM dengan memberikan bantuan

1. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok serta penyediaan sarana dan prasarana yang langsung di buat oleh kelurahan-kelurahan dengan melibatkan masyarakat secara langsung
 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan
 3. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal dan akases penggunaan lahan.
 4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan yang di laksanakan oleh dinas terkait yaitu perindustrian perdagangan dan UMM dengan memberikan bantuan Kepada Kelompok Tani seperti Bibit-bibit tanaman
 5. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro , seperti pemberdayaan untuk kelompok tenun ikat.
- c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, pemerintah kabupaten sikka telah melakukan intervensi program seperti :
 1. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur Pendidikan, layanan dan infrastruktur Kesehatan dan infrastruktur sanitasi air minum layak
 2. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti Pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta Pembangunan infrastruktur jalan.Semua program yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka untuk menanggulangi

kemiskinan ekstrem sudah sesuai dengan Surat Mendagri No.400.4.2/9839/Bangda Pada Tanggal 12 September 2023 tentang program kegiatan, sub kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan implikasi dari Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022. Namun yang menjadi permasalahan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka masih ada, bahkan untuk tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu untuk KK : 8.764 dan juga secara individu 33.288 jiwa

Menurut Ibu Maria Mei Ika Yuplina, S.STP, selaku Fungsional Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang membidangi juga tentang kemiskinan ekstrem, Ia mengatakan bahwa penyebab angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka masih ada bahkan meningkat di Kabupaten Sikka di karenakan: *By Data* dalam artian bahwa belum ada *update* data dari Pemerintah Kabupate Sikka Secara Berkala untuk angka kemiskinan ekstrem sehingga masih ada data-data yang belum akurat dan tidak sesuai dengan kondisi *real* yang ada dilapangan, sehingga menjadi salah satu pemicu masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka

Menurut Ibu Maria Mei Ika Yuplina, S.STP, harus adanya peningkatan kapasitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan yang menjadi fokus kajian dalam peningkatan kapasitas perencanaan yaitu :

1. Organisasi sebagai wadah atau Proses, peningkatan kapasitas perencanaan dapat diartikan sebagai suatu system atau mekanisme yang menyediakan berbagai sumber daya dan dukungan untuk membantu organisasi dalam meningkatkan kemampuan perencanaanya dalam

penanggulangan kemiskinan ekstrem. Sumber daya dan dukungan tersebut dapat berupa pelatihan, pendampingan, atau penyediaan alat dan bahan pendukung perencanaan.

2. Peningkatan kapasitas perencanaan sebagai wadah atau proses dapat bermanfaat bagi organisasi dalam berbagai hal :

3. Meningkatkan efektivitas perencanaan, sehingga organisasi dapat lebih tepat dalam mencapai tujuan dan sasarnya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem

- a. Meningkatkan efesiensi perencanaan, sehingga organisasi dapat menghemat waktu dan sumber daya dalam proses perencanaan

- b. Meningkatkan partisipasi dalam perencanaan, sehingga organisasi dapat lebih melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.

Sebagai proses, peningkatan kapasitas perencanaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan perencanaan organisasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. kegiatan-kegiatan tersebut berupa: (1) Pemahaman terhadap perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang mencakup pemahaman terhadap tujuan, sasaran, strategi, dan proses perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem; (2) Pengembangan keterampilan perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang mencakup keterampilan analisis, penyusunan dan evaluasi rencana dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem; (3) Penerapan

perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang mencakup penerapan rencana dalam kegiatan operasional dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Peningkatan kapasitas perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun organisasi non pemerintah. Peningkatan kapasitas perencanaan dapat dilakukan secara mandiri oleh organisasi atau dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti pelatihan, konsultan, atau organisasi lain yang memiliki keahlian dalam bidang perencanaan. kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem:

- a. Pelatihan perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang dapat diberikan kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, baik staf perencanaan, pimpinan organisasi, maupun pemangku kepentingan. Pelatihan ini dapat mencakup materi-materi yang berkaitan dengan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem, seperti analisis kemiskinan ekstrem, strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem.
- b. Pendampingan perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang dapat dilakukan oleh konsultan atau tenaga ahli perencanaan. Pendampingan ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kapasitas perencanaannya dalam penanggulangan kemiskinan

ekstrem, mulai dari penyusunan rencana hingga evaluasi rencana.

- c. Pembentukan tim perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang sebaiknya terdiri dari perwakilan dari berbagai unit organisasi atau pemangku kepentingan. Pembentukan tim perencanaan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan partisipasi dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
 - d. Penerapan teknologi informasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, yang dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan. Teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun rencana, dan mengevaluasi rencana.
4. Aspek Sumber Daya Manusia
- Peningkatan kapasitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dari aspek sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
- a. Rekrutmen dan seleksi
Proses rekrutmen dan seleksi perlu dirancang untuk memilih orang-orang yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kompetensi tersebut dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan perencanaan yang efektif.
 - b. Pengembangan profesionalisme
Pegawai yang terlibat dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan profesionalismenya. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan,

seminar, atau workshop yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

c. Penciptaan lingkungan kerja yang mendukung

Organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Lingkungan kerja yang mendukung perencanaan adalah lingkungan kerja yang memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, berbagi informasi dan pengetahuan, serta mendapatkan dukungan dari pimpinan dan rekan kerja.

Berikut adalah beberapa contoh kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dari aspek sumber daya manusia:

- a. Pelatihan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem
Pelatihan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat diberikan kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, baik staf perencanaan, pimpinan organisasi, maupun pemangku kepentingan. Pelatihan ini dapat mencakup materi-materi yang berkaitan dengan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem, seperti analisis kemiskinan ekstrem, strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem.
- b. Pendampingan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem

Pendampingan perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan oleh konsultan atau tenaga ahli perencanaan. Pendampingan ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kapasitas perencanaannya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, mulai dari penyusunan rencana hingga evaluasi rencana.

c. Pembentukan tim perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem

Tim perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem perlu dibentuk untuk memandu proses perencanaan. Tim ini sebaiknya terdiri dari perwakilan dari berbagai unit organisasi atau pemangku kepentingan. Pembentukan tim perencanaan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan partisipasi dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

d. Penerapan teknologi informasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun rencana, dan mengevaluasi rencana.

e. Peningkatan kapasitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dari aspek sumber daya manusia merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Dengan meningkatkan kapasitas perencanaan, organisasi dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasarannya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

5. Aspek Sistem Tata Laksana

Peningkatan kapasitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan

ekstrem dari aspek system tata laksana dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

a) Penyelarasan sistem tata laksana dengan perencanaan

Sistem tata laksana perlu diselaraskan dengan perencanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem tata laksana mendukung proses perencanaan, mulai dari penyusunan rencana hingga evaluasi rencana.

b) Pengembangan sistem informasi perencanaan

Sistem informasi perencanaan perlu dikembangkan untuk mendukung proses perencanaan. Sistem informasi perencanaan dapat membantu organisasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun rencana, dan mengevaluasi rencana.

c) Peningkatan koordinasi antar unit organisasi

Koordinasi antar unit organisasi perlu ditingkatkan untuk mendukung perencanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan dilakukan secara holistik dan terintegrasi.

d) Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan

Partisipasi pemangku kepentingan perlu ditingkatkan untuk mendukung perencanaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perencanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dari aspek system tata laksana:

a. Peninjauan ulang sistem tata laksana

Sistem tata laksana perlu ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tersebut masih relevan dengan perencanaan.

b. Pengembangan standar dan prosedur perencanaan

Standar dan prosedur perencanaan perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa proses perencanaan dilakukan secara konsisten dan terukur.

c. Pemanfaatan teknologi informasi

Teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan. Teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perencanaan.

Peningkatan kapasitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dari aspek system tata laksana merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dengan meningkatkan kapasitas perencanaan, organisasi dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasarannya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem

Penerapan peningkatan kapasitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dari aspek system tata laksana:

a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

b. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi antar unit organisasi terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem.

c. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Dengan menerapkan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, diharapkan

organisasi dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasarannya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem

Sesuai dengan Instruksi Presiden No 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di harapkan pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/Lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Melaksanakan Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Upaya dalam mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem ditentukan oleh peran pemerintah dan masyarakat, peningkatan peran pemerintah Kabupaten Sikka dalam menghentikan rantai kemiskinan ekstrem maka harus mengambil kebijakan Pembangunan yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan ekstrem secara optimal melalui peningkatan perencanaan dan monitoring, prasarana dan pelayanan, lingkungan ekonomi. Masyarakat harus berperan aktif dan koordinatif dalam seluruh rangkaian program penanggulangan kemiskinan ekstrem, menciptakan keselarasan program dengan budaya atau kearifan local yang berkembang di masyarakat. Mengembangkan potensi alam sekitar dan potensi diri dalam tingkatan terkecil yaitu keluarga secara produktif dalam

Upaya mengentaskan diri dari kemiskinan ekstrem.

Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibebankan kepada :

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c) Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa
- d) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PENUTUP

Kesimpulan

Kemiskinan ekstrem merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Penyebabnya tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses terhadap sumber ekonomi, pemenuhan kebutuhan sumber gizi seimbang dan hidup sehat, akses informasi tentang pendidikan, akses infrastruktur dan transportasi, diskriminasi gender, lansia dan penyandang disabilitas.

Pemerintah Kabupaten Sikka telah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dengan berbagai program yang sesuai dengan Surat Mendagri No.400.4.2/9839/Bangda Pada Tanggal 12 September 2023 tentang program kegiatan, sub kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan implikasi dari Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022. Namun, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka masih ada, bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023.

Penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka adalah belum adanya update data yang akurat dari pemerintah daerah. Data yang tidak akurat tersebut menyebabkan pemerintah tidak dapat

mengetahui secara pasti jumlah dan lokasi kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Sikka. Akibatnya, program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak dapat tepat sasaran.

Penyebab lain adalah rendahnya kapasitas perencanaan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Hal ini tercermin dari aspek organisasi, sumber daya manusia, dan sistem tata laksana yang masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Alif.(2007). *Memuseumkan kemiskinan*. Surakarta: The Asia Foundation
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Dharmastuti, C. F. (2021). *Panduan magang merdeka belajar kampus merdeka*. Jakarta: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Atma Jaya
- Fathurohman, M. F., Dayat, U., & Ramdani, R. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(1), 697-703.
- Faozan, D. (2020). Tujuan dan sasaran penguatan kapasitas kelembagaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 127-137.
- Herdiana, Dikdik. (2012). *Konsep umum pengembangan kapasitas*. [Online]. Diakses dari <http://pengembangankapasitas.blogspot.co.id/2012/08/konsep-umum-pengembangankapasitas.html>
- Hani Handoko, 2003. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Indonesia
- Instruksi Presiden Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang *Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Jakarta
- Friedman, John.(1987). *Planning In The Public Domain: From Knowledge To Action*. Princeton: Princeton University Press.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Jakarta
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang *Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Penasasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*. Jakarta
- Kincaid, D. L. (1975). *The relationship between population and income distribution*. *Population and Development Review*, 1(1), 57-75.
- Listiana, E. (2021). *Panduan Kampus Merdeka*. Pontianak : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
- Listyangsih. (2014). *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. BPFU Universitas Gajah mada
- Maramis, A. P., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). *Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan*

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)* di Kabupaten Minahasa Utara. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Ningshi, M. S. (2023). *Peran Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Peningkatan Kualitas Paud Melalui Program Holistik-Integratif*. Maumere: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nusa Nipa .
- Parjaman, T. (2022). Esai: Penguatan kapasitas badan usaha milik desa (bumdes) sebagai lembaga penggerak pembangunan perekonomian desa. *Journal of Management Review*, 5(3), 689-698.
- Putri, C. M. (2023). Peranan Bappeda Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Simeulue. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 3(3), 287-291.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.53 Tahun 2020 Tentang *Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota*. Jakarta
- Parjaman, T., Soedarmo, U. R., & Enas, E. (2019). *Penguatan Kapasitas Aparatur Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Global*. *Journal of Management Review*, 3(3), 29-42.
- “Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem.” PENDAMPING DESA, 11 July 2022, pendampingdesa.com/pedoman-umum-kemiskinan-ekstrem/.
- Ritonga, (2003), *Masalah Keberlanjutan Kemiskinan Indonesia, Pikiran Rakyat Bening Klipis*, Bandung.
- Riyadi, Bratakusumah D.S. (2005), *Perencanaan pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama*, Jakarta
- Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang *Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*
- Sari, D. A., Widywati, L. F., Rizkan, G., & Aditianata. (2021). *Pedoman Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka* . Jakarta : Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul.
- Solikatun, S., & Masruroh, Y. (2014). Kemiskinan dalam pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1)
- Sekertariat TKPKD Kabupaten Sikka, (2023) *Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sikka*. Maumere
- Sutarto , (2008), *fungsi Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi, (2003), *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Bandung, STKS Bandung Press
- Suharto, Edi. (2004). *Social welfare problem and social work in Indonesia: Trend and issues. Makalah yang disampaikan pada International seminar on curriculum development for social*

- work education in Indonesia.*
Sekolah Tinggi Kesejahteraan
Sosial. Bandung.
- Suharto, E. (2004). *Kemiskinan dan
Keberfungsian Sosial: Studi
Kasus Keluarga Miskin di
Indonesia.*
*publikasi.umm.ac.id/.../jiptummdp
pm-gdl-dwiekow177-1-bentukk-
k.doc.* Lembaga Studi
Pembangunan (LSP) STKS.
Bandung
- Suharto, Edi dkk. (2004), *Kemiskinan
dan Keberfungsian Sosial: Studi
Kasus Keluarga Miskin di
Indonesia.* Bandung, Lembaga
Studi Pembangunan (LSP) STKS.
- Soeprapto Riyadi. (2010).
*Pengembangan Kapasitas
Pemerintahan Daerah Menuju
Good Governance .* World Bank
- Tjokroamidjojo, Bintoro.
(1982). *Manajemen
pembangunan.* Jakarta: PT.
Gunung Agung.
- Wisnutama, A., Pramono, J., &
Haryanto, A. T. (2023). *analisis
strategis program
penanggulangan kemiskinan
ekstrem kabupaten madiun tahun
2022.* *Jl@P*, 12(2).